

Suhardiman
Marjoni Rachman
Jamiah



BIROKRASI

& PUBLIC GOVERNANCE



BIROKRASI DAN PUBLIC GOVERNANCE

Suhardiman
Marjoni Rachman
Jamiah



Tahta Media Group

UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

REPUBLIC INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC'00202312714, 11 Februari 2023

Pencipta

Nama : **Suhardiman, Marjoni Rachman dkk**
Alamat : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Jl. Ir. H. Juanda No.80
Samarinda , Kota Samarinda, KALIMANTAN TIMUR, 75124

Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : **Suhardiman, Marjoni Rachman dkk**
Alamat : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Jl. Ir. H. Juanda No.80
Samarinda , Kota Samarinda, KALIMANTAN TIMUR, 75124

Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : **Buku**
Judul Ciptaan : **BIROKRASI DAN PUBLIC GOVERNANCE**
Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 11 Februari 2023, di Samarinda

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.

Nomor pencatatan : 000445636

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual
i.b
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Anggoro Dasananto
NIP.196412081991031002

Disclaimer:
Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.

LAMPIRAN PENCIPTA

No	Nama	Alamat
1	Suhardiman	Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Jl. Ir. H. Juanda No.80 Samarinda
2	Marjoni Rachman	Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Jl. Ir. H. Juanda No.80 Samarinda 75124
3	Jamiah	Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Jl. Ir. H. Juanda No.80 Samarinda 75124

LAMPIRAN PEMEGANG

No	Nama	Alamat
1	Suhardiman	Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Jl. Ir. H. Juanda No.80 Samarinda
2	Marjoni Rachman	Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Jl. Ir. H. Juanda No.80 Samarinda 75124
3	Jamiah	Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Jl. Ir. H. Juanda No.80 Samarinda 75124



BIROKRASI DAN PUBLIC GOVERNANCE

Penulis:
Suhardiman
Marjoni Rachman
Jamiah

Desain Cover:
Tahta Media

Editor:
Tahta Media

Proofreader:
Tahta Media

Ukuran:
viii, 191 , Uk: 15,5 x 23 cm

ISBN: 978-623-8192-00-7

Cetakan Pertama:
Februari 2023

Hak Cipta 2023, Pada Penulis

Isi diluar tanggung jawab percetakan

Copyright © 2023 by Tahta Media Group
All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT TAHTA MEDIA GROUP
(Grup Penerbitan CV TAHTA MEDIA GROUP)
Anggota IKAPI (216/JTE/2021)

KATA PENGANTAR

Birokrasi merupakan instrumen penting di dalam suatu negara, oleh sebab itu negara harus membangun suatu sistem administrasi yang bertujuan untuk melayani kepentingan rakyatnya. Oleh sebab itu perlu dibangun birokrasi pemerintah yang berpihak kepada seluruh kepentingan masyarakat. Sementara itu Governance Publik atau *Public Governance* merupakan suatu konsep yang merepresentasikan kemampuan birokrasi pemerintah dalam membantu warga masyarakatnya secara inklusif, tanpa diskriminasi dan memenuhi kepuasan individual dan kemakmuran rakyat.

Buku *Birokrasi dan Governance Publik* ini mencoba untuk mengkaji teori dan konsep yang berkaitan dengan birokrasi dan governance publik yang diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan acuan maupun referensi bagi para praktisi, akademisi dan mahasiswa serta pemerhati Ilmu Administrasi Publik.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih pada semua pihak, sehingga bahan perkuliahan ini dapat selesai. Penulis masih terus mengharapkan kritik dan saran demi sempurnanya penyusunan bahan ajar ini dimasa mendatang.

Semoga ini dapat bermanfaat bagi para mahasiswa khususnya yang memprogramkan mata kuliah Budaya Birokrasi. Selamat belajar, dan semoga sukses.

Samarinda, Februari 2023

Penulis

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	vi
Daftar Isi	vii
BAB I DEFENISI DAN ALIRAN BIROKRASI.....	1
1.1 Defenisi.....	1
1.2 Makna Birokrasi :	4
1.3 Beberapa Aliran Pemikiran Tentang Birokrasi.....	5
1.4 Mazhab-Mazhab Tentang Birokrasi	9
BAB II PEMIKIRAN WEBER TENTANG BIROKRASI.....	11
2.1 Konsep Pemikiran Weber Tentang Birokrasi	11
2.2 Kritik Terhadap Pemikiran Weber.....	15
2.3 Jawaban Weber Atas Kritik.....	18
BAB III PATOLOGI BIROKRASI	21
3.1 Konsep Patologi Birokrasi.....	21
3.2 Kelompok-Kelompok Patologi Birokrasi.....	23
BAB IV REFORMASI BIROKRASI	26
4.1 Arti Dan Pentingnya Reformasi Birokrasi	26
4.2 Pengaruh Political Will Pemerintah Terhadap Reformasi Birokrasi	27
4.3 Reformasi Birokrasi Melalui Revitalisasi Konsep Publik.....	28
4.4 Aspek Utama Membangun Birokrasi	33
4.5 Sasaran Reformasi Birokrasi	35
4.6 Penataan Kelembagaan	38
4.7 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia/ Aparatur.....	39
4.8 Penilaian Kinerja Dan Instrumen Pengukuran Kinerja.....	44
4.9 Akuntabilitas (Pertanggungjawaban).....	48
4.10 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.....	53
4.11 Perjalanan Reformasi Birokrasi Indonesia	55
BAB V PERAN BIROKRASI DALAM NEGARA	69
5.1 Peran Birokrasi Dalam Suatu Negara Mencakup Empat Fungsi Utama.....	69
5.2 Mengapa Birokrasi Kuat Secara Politik.....	70

5.3	Mengeliminas Penyalahgunaan Kekuasaan Birokrasi	76
BAB VI METODE PENGENDALIAN BIROKRASI.....		79
6.1	Pengertian.....	79
6.2	Model Pengendalian Birokrasi.....	79
6.3	Kendala Dan Optimalisasi Birokrasi	81
6.4	Berbagai Faktor Yang Menjadi Kendala Birokrasi Dalam Menjalankan Fungsinya	82
BAB VII MEWUJUDKAN PELAYANAN PRIMA DAN GOOD GOVERNANCE (PEMERINTAHAN YANG BAIK)		90
7.1	Pelayanan Prima, Kualitas Pelayanan, Dan Kepuasam Pelanggan	90
7.2	Perilaku Melayani	111
7.3	Kepuasan Pelanggan.....	114
7.4	Indeks Kepuasan Pelanggan (Ikm).....	118
BAB VIII GOOD GOVERNANCE.		121
8.1	PENTINGNYA PENERAPAN <i>GOOD GOVERNANCE</i>	121
8.2	Konsep Good Governance.....	124
8.3	Unsur, Prinsip, Elemen <i>Good Governance</i>	134
8.4	Prinsip Utama Unsur <i>Good Governance</i> Yakni :.....	146
8.5	Manajemen Perubahan Dan <i>Good Governance</i>	148
8.6	Penataan Ulang Dan Penerapan Prinsip Asas <i>Good Governance</i> Pada Sektor Publik	150
8.7	Syarat Dan Pelaku <i>Good Governance</i>	160
8.8	Upaya Mewujudkan <i>Good Governance</i>	161
8.9	Program Pembangunan	161
8.10	Kendala Mewujudkan <i>Good Governance</i>	169
8.11	<i>Good Governance</i> Masa Depan Dan Strategi Mencapainya	171
8.12	Prinsip-Prinsip Good Governance :.....	178
8.13	Langkah-Langkah Untuk Mewujudkan Good Governance.....	180
DAFTAR PUSTAKA		184
PROFIL PENULIS		190

BAB I

DEFENISI DAN ALIRAN BIROKRASI

1.1 DEFENISI

Selama ini, organisasi birokrasi di kalangan masyarakat dipahami sebagai sebuah organisasi yang melayani masyarakat dengan *stereotype* yang negatif antara lain, yaitu proses pengurusan surat atau dokumen lain yang berbelit-belit, tidak ramah, tidak adil, tidak transparan, mempersulit dan memperlama pelayanan, dan sebagainya. Tidak salah masyarakat menggambarkan birokrasi dengan hal-hal seperti itu karena memang pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan yang dialami secara langsung oleh masyarakat seperti itu, misalnya saat pembuatan KTP, akte kelahiran, mengurus sertifikat tanah, membuat paspor, memungut retribusi, dan sebagainya. Tetapi apakah memang seperti itu gambaran birokrasi (juga di Indonesia) saat ini ? Bagaimana dengan era reformasi yang terjadi di Indonesia ? Apakah tidak atau belum mampu menghapus *stereotype* negatif terhadap birokrasi ?

Untuk mengetahui jawaban hal-hal tersebut di atas, akan kita bahas dengan terlebih dahulu mengetahui dan memahami tentang definisi dan pengertian serta makna tentang birokrasi.

1. Birokrasi

Terminologi birokrasi dalam literatur Ilmu Administrasi Negara atau Ilmu Politik adalah sebagai berikut :

1. berarti Organisasi yang rasional (*rational organization*)
2. berarti Ketidakefisienan organisasi (*organizational inefficiency*)
3. berarti Pemerintahan oleh para pejabat (*rule by official*)
4. berarti Administrasi negara (*public administration*)
5. Administrasi oleh para pejabat (*administration by official*)
6. Bentuk organisasi dengan ciri tertentu, yaitu adanya hirarki dan peraturan
7. Salah satu ciri dari masyarakat modern yang mutlak (an essential quality of modern society)

Sedangkan untuk definisi birokrasi, banyak sekali para ahli atau tokoh yang mendefinisikan tentang birokrasi, diantaranya adalah :

Birokrasi yang dalam bahasa Inggris, "Bureaucracy" berarti dari kata *Bureau* (berarti meja) dan *crates* (berarti kekuasaan), dimaksudkan adalah kekuasaan berada pada orang-orang yang ada dibelakang meja. Di Indonesia cenderung dikonotasikan sebagaimana telah digambarkan seperti di atas.

Bintoro Tjakroamidjojo (1984) birokrasi dimaksudkan untuk mengorganisir secara teratur suatu pekerjaan yang harus dilakukan oleh banyak orang. Dengan demikian sebenarnya tujuan dari adanya birokrasi adalah agar pekerjaan dapat diselesaikan dengan cepat dan terorganisir

Fritz Marstein Marx, birokrasi adalah tipe organisasi yang dipergunakan pemerintahan modern untuk pelaksanaan berbagai tugas-tugas yang bersifat spesialisasi, dilaksanakan dalam sistem administrasi yang khususnya oleh aparat pemerintah

Raint Nugroho Dwijowijoto, birokrasi adalah lembaga yang sangat kuat dengan kemampuan untuk meningkatkan kapasitas-kapasitas potensial terhadap hal-hal yang baik maupun buruk dalam keberadaannya sebagai instrumen administrasi rasional yang netral pada skala yang besar

JB. Kristiadi (1994:93) Birokrasi adalah merupakan struktur organisasi di sektor pemerintahan, yang memiliki ruang lingkup tugas-tugas sangat luas serta memerlukan organisasi besar dengan sumber daya manusia yang besar pula jumlahnya. Birokrasi yang dimaksudkan untuk penyelenggaraan bernegara, penyelenggaraan pemerintahan termasuk di dalamnya pelayanan umum dan pembangunan, seringkali oleh masyarakat diartikan konotasi yang berbeda.

G. Kartasapoetra (1994:2) birokrasi adalah pelaksanaan perintah-perintah secara organisatoris yang harus dilaksanakan sedemikian rupa sehingga dan secara sepenuhnya pada pelaksanaan pemerintahan melalui institusi atau kantor-kantor.

Priyo Budi Santoso (1997) birokrasi adalah keseluruhan birokrasi pemerintah, yang menjalankan tugas-tugas negara dalam berbagai unit organisasi pemerintah dibawah departemen dan lembaga-lembaga non departemen, baik dipusat maupun didaerah, seperti ditingkat propinsi, kabupaten kecamatan, maupun desa dan kelurahan.

Prayudi Atmosudirdjo (1971) birokrasi mempunyai tiga arti : (a) Birokrasi sebagai suatu tipe organisasi. Sebagai suatu tipe organisasi tertentu, birokrasi cocok untuk melaksanakan dan menyelenggarakan suatu macam pekerjaan

yang terikat pada peraturan-peraturan yang bersifat rutin; **(b)** Birokrasi sebagai sistem, yang artinya adalah suatu sistem kerja Yang berdasar tata hubungan kerjasama antara jabatan-jabatan (pejabat-pejabat) secara langsung pada persoalannya dan secara formal serta jiwa tanpa pilih kasih atau tanpa pandang bulu; **(c)** Birokrasi sebagai jiwa kerja, dslam hal ini merupakan jiwa kerja yang kaku, sebab cara bekerjanya seolah-olah seperti mesin, ditambah lagi dengan disiplin kerja yang ketat dan sedikitpun tidak mau menyimpang dari apa yang diperintahkan atasan atau yang telah ditetapkan oleh peraturan-peraturan.

Jadi berdasarkan pendapat para Ahli diatas, maka pengertian birokrasi adalah sebagai berikut:

1. Birokrasi adalah Suatu sistem dari organisasi yang kompleks yang memerlukan penanganan berbagai macam keterampilan teknis yang dipergunakan untuk melaksanakan kebijaksanaan yang telah ditentukan oleh pihak lain
2. Birokrasi adalah sebuah ruang mesin negara yang didalamnya terdiri dari orang-orang (pejabat) yg digaji dan dipekerjakan oleh negara untuk memberikan nasehat dan melaksanakan kebijakan politik.
3. Birokrasi adalah suatu sistem kewenangan, kepegawaian, jabatan dan metode-metode yang dipergunakan oleh pemerintah untuk melaksanakan program-programnya.
4. Birokrasi dipergunakan oleh organisasi negara maupun swasta
5. Birokrasi adalah merupakan lembaga pemerintah yang menjalankan fungsi pelayanan pemerintahan baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah.
6. Birokrasi adalah suatu prosedur yang efektif dan efesien yang didasari oleh teori dan aturan yg berlaku serta memiliki spesialisasi menurut tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi/institusi

Di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia “biro” diartikan kantor dan istilah birokrasi mempunyai beberapa arti :

- a. Pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai bayaran yang tidak dipilih oleh rakyat
- b. Cara pemerintahan yang sangat dikuasai oleh pegawai negeri
- c. Cara kerja atau susunan pekerjaan yang serba lambat, serba menurut aturan, kebiasaan, dan banyak liku-likunya. Definisi dalam kamus

bahasa Indonesia ini nampaknya tidak hanya berusaha memberikan makna “birokrasi” tetapi juga istilah turunan yang mengacu pada sifat atau kebiasaan birokrasi.

Untuk menggambarkan organisasi dalam pemerintahan negara Indonesia, maka birokrasi bisa didefinisikan sebagai keseluruhan organisasi pemerintah, yang menjalankan tugas-tugas negara dalam berbagai unit organisasi pemerintah dibawah Departemen dan Lembaga-lembaga Non Departemen, baik di tingkat pusat maupun di daerah seperti di tingkat Propinsi, Kabupaten, dan Kecamatan, bahkan pada tingkat Kelurahan dan Desa. Sedangkan Birokrat dalam arti pejabat pimpinan tingkat atas dan menengah dalam suatu struktur organisasi pemerintah umum. Jadi birokrat terdiri dari unsur-unsur pimpinan yaitu para pejabat dalam organisasi pemerintahan baik di pusat maupun di daerah.

Dari beberapa ahli yang sudah mendefinisikan birokrasi tersebut, bisa ditarik benang merah bahwa sebenarnya secara umum birokrasi adalah tata kerja pemerintahan agar tujuan negara bisa tercapai secara efektif dan efisien. Oleh karena itu kita harus obyektif dan terbuka, dan tata kerja ini untuk tujuan bersama (bukan per individu atau per orang).

2. Governance

Adalah kondisi, aktivitas, kegiatan dalam melaksanakan pemerintahan atau suatu proses kegiatan penyelenggaraan pemerintahan atau negara, pembangunan, masyarakat, ekonomi yang melibatkan pemerintah, masyarakat, privat atau **swasta**.

3. Governance Public

Adalah cara dimana stakeholders saling berinteraksi dengan tujuan mempengaruhi hasil kebijakan public (Bovaird et al., 2003). Stakeholders tersebut antara lain adalah warga negara, organisasi masyarakat, media massa, Lembaga public, politisi, organisasi nirlaba dan sebagainya.

1.2 MAKNA BIROKRASI :

Meskipun secara umum sudah ada penjelasan atau definisi tentang birokrasi, tetapi dalam khasanah ilmu pengetahuan perbedaan pendapat dan pandangan sangat dihargai. Demikian juga dengan perbedaan pandangan tentang birokrasi. Ada beberapa tokoh atau ahli yang memandang birokrasi

secara positif, ada juga yang secara negatif, tetapi ada juga yang melihatnya secara netral (*value free*).

1. Makna Positif :

Birokrasi yang bermakna positif diartikan sebagai birokrasi legal-rasional yang bekerja secara efisien dan efektif. Birokrasi tercipta karena kebutuhan akan adanya penghubung antara negara dan masyarakat, untuk menegajawantahkan kebijakan- kebijakan negara. Artinya, birokrasi dibutuhkan baik oleh negara maupun oleh rakyat. Tokoh pendukungnya adalah : Max Weber dan Hegel

2. Makna Negatif :

Birokrasi yang bermakna negatif diartikan sebagai birokrasi yang penuh dengan patologi (penyakit), organisasi tambun, boros, tidak efisien dan tidak efektif, korupsi, dll. Birokrasi adalah alat penindas (penghisap) bagi kaum yang lemah (miskin) dan hanya membela kepentingan orang kaya. Artinya, birokrasi hanya menguntungkan kelompok orang kaya saja. Tokoh pendukungnya adalah : Karl Max dan Harold Laski

3. Makna Netral (*Value Free*)

Sedangkan birokrasi yang bermakna netral diartikan sebagai keseluruhan pejabat negara pada cabang eksekutif atau bisa juga diartikan sebagai setiap organisasi yang berskala besar.

1.3 BEBERAPA ALIRAN PEMIKIRAN TENTANG BIROKRASI

Dalam ilmu sosial, ketika muncul definisi, sudah pasti tidak mungkin hanya dilihat dari satu aliran/ perspektif/ pemikiran/ teori saja, karena ilmu sosial mempelajari tentang manusia yang antara satu dan lainnya punya banyak perbedaan (misalnya berbeda tentang latar belakangnya, status ekonominya, status sosialnya, adat istiadatnya, dan sebagainya). Sehingga ilmu sosial adalah ilmu yang kaya akan pemikiran dan pendapat atau sudut pandang.

Aliran pemikiran tentang birokrasi ini dikenal dengan istilah TEORI. Dalam ilmu politik terdapat beberapa teori (yang menonjol) dalam membentuk institusi (birokrasi) di berbagai negara, yakni :

1. Teori *rational-administrative model*
2. Teori *power block model*

3. Teori *bureaucratic oversupply model*
4. Teori *new public service*

1. Teori rational-administrative model,

Adalah model yang dikembangkan oleh Max Weber. Model ini menyatakan bahwa birokrasi yang ideal adalah birokrasi yang berdasarkan pada sistem peraturan yang rasional, dan tidak berdasarkan pada paternalisme kekuasaan dan kharisma. Dalam teori ini, birokrasi harus dibentuk secara rasional sebagai organisasi sosial yang dapat diandalkan, terukur, dapat diprediksikan, dan efisien. Penciptaan birokrasi secara rasional ini adalah tuntutan demo-kratisasi yang mensyaratkan diimplementasikannya *law enforcement* dan legalisme formal dalam tugas-tugas penyelenggaraan negara. Oleh karena itu birokrasi harus diciptakan sebagai sebuah organisasi yang terstruktur, kuat, dan memiliki sistem kerja yang terorganisir dengan baik. Contoh penerapan dari teori ini adalah pada negara-negara dengan tipe kepemimpinan yang dominan.

2. Teori power block model

Adalah berdasar pada pemikiran bahwa birokrasi adalah merupakan penghalang (block) rakyat dalam melaksanakan kekuasaan. Pemikiran bahwa birokrasi merupakan alat pembendung kekuasaan rakyat (yang diwakili oleh politisi) memiliki keterkaitan erat dengan ideologi Marxisme. Oleh Marx, birokrasi dipandang sebagai sebuah fenomena yang memiliki keterkaitan erat dengan proses dialektika kelas sosial antara si kaya dan si miskin. Marx memandang bahwa birokrasi merupakan sebuah wujud mekanisme pertahanan dan organ dari kaum bourgeois (borjuis) untuk mempertahankan kekuasaan dalam sistem kapital. Birokrat tidak segan-segan untuk menjadi agen kaum kaya untuk menekan dan mengeksploitasi kaum miskin, misalnya ketika mereka melakukan pengusuran, membuat peraturan ketenagakerjaan yang menguntungkan kaum pengusaha, menghambat organisasi kelompok tani/buruh, dsb. Contoh dari penerapan teori ini adalah pada negara-negara dengan ideologi komunis.

Oleh karena itu para pemikir teori ini mengusulkan untuk mengadakan "revolusi politik", dimana birokrasi harus dirubah sebagai alat rakyat kaum proletariat yang dapat dikomando oleh para politisi, dan

dijauhkan dari keintiman hubungan dengan para pengusaha/ pemilik kapital. Hal ini dapat dilakukan dengan mengurangi sesedikit mungkin kekuasaan birokrasi dan memperketat pengawasan oleh politisi sebagai wakil rakyat. Tokoh dari model ini adalah : Ralp Miliband (1969), Trotsky (1937).

3. Teori bureaucratic oversupply model

Adalah sebuah teori yang berbasis pada pemikiran ideologi liberalisme. Teori ini muncul sebagai respon dari teori birokrasi Weber maupun Karl Max. Teori ini pada intinya menyoroti kapasitas organisasi birokrasi yang dipandang terlalu besar (*too large*), terlalu mencampuri urusan rakyat (*too intervenee*), dan mengkonsumsi terlalu banyak sumber daya (*consuming too many scarce resources*). Pejabat birokrasi dimotivasi oleh kepentingan-kepentingan mereka sendiri. Oleh karenanya, mereka cenderung untuk membesarkan institusi mereka agar mempermudah pekerjaan dan tanggung jawab memperbanyak anggaran, dan memiliki kewenangan sebanyak mungkin. Contoh dari penerapan model ini adalah pada negara-negara berkembang pada umumnya.

Karenanya para pemikir teori ini menuntut agar kapasitas birokrasi diperkecil (dengan semboyan *less government*), dengan cara jumlah aparatur dikurangi dan peranan hendaknya didelegasikan kepada sektor swasta (*private sector*). Tokoh dari teori ini adalah Niskanen (1971), dan Anthony Down (1967)

4. Teori new public service

Adalah merupakan bentuk antithesa (penentangan) terhadap pemikiran bahwa peranan birokrasi hendaknya diserahkan kepada mekanisme pasar. Menurut teori ini bagaimanapun juga birokrasi merupakan organisasi yang memiliki peranan dan corak kerja yang berbeda dengan sektor swasta sehingga peranannya tidak mungkin digantikan dengan organisasi swasta (*private sector*).

Baik buruknya organisasi birokrasi bukan terletak pada apakah mereka memenuhi standart nilai-nilai pasar atau tidak, melainkan pada persoalan apakah mereka bisa memberikan pelayanan yang terbaik bagi rakyat. Sehingga peranan birokrasi justru harus dikembalikan kepada fitrahnya yaitu

sebagai pelayan publik. Birokrasi adalah alat rakyat belaka, dan harus tunduk kepada apapun suara rakyat, sepanjang suara itu sah, dan legitimate secara normative dan konstitusional. Tokoh dari teori ini adalah Denhardt & Denhardt (2000)

Aliran pemikiran tentang birokrasi dikenal dengan istilah TEORI. Dalam ilmu politik terdapat beberapa teori (yang menonjol) dalam membentuk institusi di berbagai negara, yakni : 1) Teori *rational-administrative model*; 2) Teori *power block model*, 3) Teori *bureaucratic oversupply model*, 4) Teori *new public service*.

Teori *rational-administrative model* menyatakan bahwa birokrasi yang ideal adalah birokrasi yang berdasarkan pada sistem peraturan yang rasional, dan tidak berdasarkan pada paternalisme kekuasaan dan kharisma. Birokrasi harus dibentuk secara rasional sebagai organisasi sosial yang dapat diandalkan, terukur, dapat diprediksikan, dan efisien. Tokoh : Max Weber.

Teori *power block model* menyatakan bahwa birokrasi adalah merupakan penghalang (*block*) rakyat dalam melaksanakan kekuasaan. Birokrasi dipandang sebagai sebuah fenomena yang memiliki keterkaitan erat dengan proses dialektika kelas sosial antara si kaya dan si miskin. Oleh karena itu para pemikir teori ini mengusulkan untuk mengadakan "*revolusi politik*". Tokoh: Ralp Miliband dan Trotsky.

Teori *bureaucratic oversupply model*, muncul sebagai respon dari teori birokrasi Weber maupun Karl Max. Teori ini pada intinya menyoroti kapasitas organisasi birokrasi yang dipandang terlalu besar, terlalu mencampuri urusan rakyat, dan mengkonsumsi terlalu banyak sumber daya. Karenanya para pemikir teori ini menuntut agar kapasitas birokrasi diperkecil (dengan semboyan *less government*). Tokoh Niskanen dan Anthony Down.

Teori *new public service*, merupakan bentuk antithesa (penentangan) terhadap pemikiran bahwa peranan birokrasi hendaknya diserahkan kepada mekanisme pasar. Menurut teori ini bagaimanapun juga birokrasi merupakan organisasi yang memiliki peranan dan corak kerja yang berbeda dengan sektor swasta sehingga peranannya tidak mungkin digantikan dengan organisasi swasta (*private sector*). Sehingga peranan birokrasi justru harus dikembalikan kepada fitrahnya yaitu sebagai pelayan publik. Tokoh : Denhardt & Denhardt

1.4 MAZHAB-MAZHAB TENTANG BIROKRASI

Dalam paradigma pemikiran tentang bagaimana birokrasi lahir, para ahli sosial politik berpendapat bahwa pada umumnya terdapat dua *mainstream* pemikiran (Budi Setiyono, 2004: 14-16).

Pertama, birokrasi lahir sebagai alat kekuasaan, yang kemudian memunculkan Mazhab Kekuasaan;

kedua, birokrasi lahir dan dibentuk karena kebutuhan masyarakat untuk dilayani, yang kemudian memunculkan Mazhab Kebutuhan Rakyat.

Mainstream pemikiran pertama menyebutkan bahwa penguasa yang kuat harus dilayani oleh para pembantu (aparatur) yang cerdas dan dapat dipercaya (loyal). Konsep pemikiran ini banyak diilhami oleh pemikiran politik Nicollo Machiavelli yang menyarankan bahwa apabila penguasa ingin kekuasaannya berjalan efektif, maka ia harus memiliki organ aparatur yang solid, kuat, profesional, dan kokoh.

Dengan demikian birokrasi dibentuk sebagai sarana bagi penguasa untuk mengimplementasikan kekuasaan (*power*) dan kepentingan (*interest*) mereka dalam mengatur kehidupan negara. Dalam paham tradisional Jawa misalnya, aparatur birokrasi (punggawa kerajaan) disebut sebagai *abdi dalem ingkang sinuwun* (abdi raja). Sehingga aparatur birokrasi memiliki tugas untuk “mengejawantahkan/ melaksanakan” titah kekuasaan raja yang diberikan oleh Tuhan (Jawa: *Sang Hyang Dumadi*) sehingga mereka sepenuhnya bertanggung jawab kepada raja, dan bukan kepada rakyat.

Mainstream pemikiran kedua menyatakan, bahwa birokrasi ada karena memang rakyat menghendaki eksistensi mereka untuk membantu masyarakat mencapai tujuan-tujuan tertentu yang telah ditetapkan bersama. Dengan demikian, yang menentukan ada tidaknya birokrasi dalam kehidupan masyarakat adalah adanya kebutuhan mereka akan lembaga yang bertugas menyelenggarakan pelayanan publik.

Dari kedua *mainstream* (*arus utama*) yang ada, maka muncullah kategori organisasi birokrasi berdasar tugas pokok yang diembannya, yaitu :

a. Birokrasi Pemerintaahn Umum

Yaitu birokrasi yang menjalankan tugas-tugas pemerintahan umum (Contoh : birokrasi yang bertugas memelihara ketertiban dan keamanan

dari pusat sampai ke desa). Pada kategori ini tugas pokok birokrasi masuk dalam “*regulatif function*”.

b. Birokrasi Pembangunan

Yaitu birokrasi yang menjalankan salah satu bidang yang khusus guna mencapai tujuan pembangunan (Contoh : birokrasi yang menjalankan tugas mencapai pembangunan pertanian, kesehatan, pendidikan, industri, dan sebagainya) Pada kategori ini tugas pokok birokrasi masuk dalam “*development function*” atau “*adaptive function*”.

c. Birokrasi Pelayanan

Yaitu bagian birokrasi yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Contoh : Rumah Sakit, sekolah-sekolah (Sekolah Dasar/SD sampai Sekolah Menengah Umum/SMU), Kantor Koperasi, Unit Pelayanan Kementerian-kementerian/ departemen transmigrasi, sosial, dll. Pada kategori ini tugas pokok birokrasi adalah “*service function*” langsung kepada rakyat.

Kebutuhan akan pelayanan publik yang dijalankan birokrasi akan berjalan seiring dengan kebutuhan kolektif dari para anggota masyarakat terhadap jenis pelayanan tertentu. Pada masyarakat pedesaan misalnya, kebutuhan kolektifnya akan berbeda dengan masyarakat perkotaan, sehingga jenis-jenis organ birokrasi yang melayani masyarakat desa akan berbeda dengan masyarakat kota. Masyarakat desa membutuhkan Dinas Pertanian karena banyak masyarakat desa yang jadi petani, tetapi masyarakat kota tidak. Sedangkan masyarakat kota lebih membutuhkan Dinas Tata Kota karena lahan perkotaan yang semakin sempit sehingga perlu diatur, tetapi masyarakat desa tidak.

DAFTAR PUSTAKA

- Harbani Pasolong, (2007) *Teori Administrasi publik*, Alfabeta, Bandung.
- A. Rahman H.I, (2007). *Sistem politik Indonesia*. Graha Ilmu. Jakarta.
- Sarundajang SH (2005), *Birokrasi Dalam Otonomi Daerah (Upaya Mengatasi Kegagalannya)*. Kata Hasta Pustaka. Jakarta
- Prof.Dr.Miftah Thoha, MPA. (2007).*Birokrasi Politik di Indonesia*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Prof.DR. Adri Patton,M.Si. (2008). *Akuntabilitas Pejabat Publik*. Univ. Negeri Malang. Surabaya
- Prof.Dr.Adam Idris, M.Si. (2007). *Etika Birokrasi dan Akuntabilitas Publik*. Prog.Magister Ilmu Administrasi Negara, Fisip Unmul. Samarinda
- Drs. Sampara Lukman (1999). *Manajemen Kualitas Pelayanan*. STIA LAN Press. Jakarta.
- Dr. Kridawati Sudhana, MS dkk. (2004). *Etika Birokrasi*. Univ. Negeri Malang. Surabaya.
- Dr. Delly Mustafa, M.Si. (2013). *Birokrasi Pemerintahan*, Alfabeta, Bandung
- Prof. Dr. Miftah Thoha. (2014). *Birokrasi dan Dinamika Kekuasaan*, Prenada Media Group, Jakarta
- Budi Setiono, 2005, *Jaring Birokrasi : Tinjauan Dari Aspek Politik dan Administrasi*”, Jakarta, Gugus Press
- Martin Albrow, 1989, *Bureaucracy*, London, Routledge
- Peter M Blau dan MW Meyer, *Bureaucracy in Modern Society*, 1956, alih bahasa oleh Slamet Rijanto, 2000, Jakarta, Prestasi Pustakaraya.
- Budi Setiono, 2005, , *Jaring Birokrasi :Tinjauan Dari Aspek Politik dan Administrasi*”, Jakarta, Gugus Press
- Martin Albrow, 1989, *Bureaucracy*, London, Routledge
- Martin Albrow, 1989, *Bureaucracy*, London, Routledge

- Peter M Blau dan MW Meyer, *Bureaucracy in Modern Society*, 1956, alih bahasa oleh Slamet Rijanto, 2000, Jakarta, Prestasi Pustakaraya
- Ngadisah & Darmanto, 2008, *Birokrasi Indonesia (Modul)*, Jakarta, Penerbit Universitas Terbuka
- Albrow, Martin, 1996, *Birokrasi*, diterjemahkan oleh m. Rusli Karim dan Totok daryanto, Yogyakarta, CV Tiara Wacana
- Benveniste, Guy, 1994, *Birokrasi*, Jakarta, PT rajaGrafindo Persada
- Blau, Peter, Meyer, Marshall, 2000, *Birokrasi Dalam Masyarakat Modern*, Jakarta, Penerbit Prestasi Pustakaraya
- Budi Setiono, 2005, *Jaring Birokrasi : Tinjauan Dari Aspek Politik dan Administrasi*”, Jakarta, Gugus Press
- Albrow, Martin, 1996, *Birokrasi*, diterjemahkan oleh m. Rusli Karim dan Totok daryanto, Yogyakarta, CV Tiara Wacana
- Benveniste, Guy, 1994, *Birokrasi*, Jakarta, PT rajaGrafindo Persada
- Blau, Peter, Meyer, Marshall, 2000, *Birokrasi Dalam Masyarakat Modern*, Jakarta, Penerbit Prestasi Pustakaraya
- Budi Setiono, 2005, *Jaring Birokrasi :Tinjauan Dari Aspek Politik dan Administrasi*”, Jakarta, Gugus Press
- Albrow, Martin, 1996, *Birokrasi*, diterjemahkan oleh m. Rusli Karim dan Totok daryanto, Yogyakarta, CV Tiara Wacana
- Benveniste, Guy, 1994, *Birokrasi*, Jakarta, PT rajaGrafindo Persada
- Blau, Peter, Meyer, Marshall, 2000, *Birokrasi Dalam Masyarakat Modern*, Jakarta, Penerbit Prestasi Pustakaraya
- Budi Setiono, 2005, *Jaring Birokrasi :Tinjauan Dari Aspek Politik dan Administrasi*”, Jakarta, Gugus Pres
- Budi, Priyo, Santosa, 1993, *Birokrasi Pemerintah Orde Baru : Perspekti Kultural dan Struktural*, PT Rajawali Press, Jakarta
- Budi Setiono, 2005, , *Jaring Birokrasi :Tinjauan Dari Aspek Politik dan Administrasi*”, Jakarta, Gugus Press
- Martin Albrow, *Bureaucracy*, 1989 For Change, London, Routledge
- Peter M Blau dan MW Meyer, *Bureaucracy in Modern Society*, 1956, alih bahasa oleh Slamet Rijanto, 2000, Jakarta, Prestasi Pustakaraya
- Ngadisah & Darmanto, 2008, *Birokrasi Indonesia (Modul)*, Jakarta, Penerbit Universitas Terbuka
- Albrow, Martin, 1996, *Birokrasi*, diterjemahkan oleh M. Rusli Karim dan

- Totok daryanto, Yogyakarta, CV Tiara Wacana
- Benveniste, Guy, 1994, ***Birokrasi***, Jakarta, PT raja Grafindo Persada
- Blau, Peter, Meyer, Marshall, 2000, ***Birokrasi Dalam Masyarakat Modern***, Jakarta, Penerbit Prestasi Pustakaraya
- Budi, Priyo, Santosa, 1993, Birokrasi Pemerintah Orde Baru : Perspektif Kultural dan Struktural, PT Rajawali Press, Jakarta
- Benveniste, Guy, 1994, ***Birokrasi***, Jakarta, PT raja Grafindo Persada
- Budiono, Priyo, Santosa, 1993, Birokrasi Pemerintah Orde Baru : Perspektif Kultural dan Struktural, PT Rajawali Press, Jakarta
- Budi Setiono, 2005, *Jaring Birokrasi : Tinjauan Dari Aspek Politik dan Administrasi*”, Jakarta, Gugus Press
- Albrow, Martin, 1996, ***Birokrasi***, diterjemahkan oleh M. Rusli Karim dan Totok daryanto, Yogyakarta, CV Tiara Wacana
- Benveniste, Guy, 1994, ***Birokrasi***, Jakarta, PT raja Grafindo Persada
- Blau, Peter, Meyer, Marshall, 2000, ***Birokrasi Dalam Masyarakat Modern***, Jakarta, Penerbit Prestasi Pustakaraya
- Budi Setiono, 2005, ***Jaring Birokrasi : Tinjauan Dari Aspek Politik dan Administrasi*”**, Jakarta, Gugus Press
- Benveniste, Guy, 1994, ***Birokrasi***, Jakarta, PT raja Grafindo Persada
- Blau, Peter, Meyer, Marshall, 2000, ***Birokrasi Dalam Masyarakat Modern***, Jakarta, Penerbit Prestasi Pustakaraya
- Budi Setiono, 2005, ***Jaring Birokrasi Tinjauan Dari Aspek Politik dan Administrasi*”**, Jakarta, Gugus Press
- Osborne, David and Plastrik, Peter, 2000, ***Memangkas Birokrasi Lima Strategi Menuju Pemerintahan Wirausaha***, Penerjemah Abdul Rosyid dan Ramelan, Jakarta, Penerbit PPM
- Said, Mas’ud, 2007, ***Birokrasi di Negara Birokratis***, Malang, UMM Press
- Benveniste, Guy, 1994, ***Birokrasi***, Jakarta, PT raja Grafindo Persada
- Blau, Peter, Meyer, Marshall, 2000, ***Birokrasi Dalam Masyarakat Modern***, Jakarta, Penerbit Prestasi Pustakaraya
- Ngadisah & Darmanto, 2008, Birokrasi ***Indonesia***, Jakarta, Penerbit Universitas Terbuka
- Albrow, Martin, 1996, Birokrasi, diterjemahkan oleh M. Rusli Karim Dan Totok daryanto, Yogyakarta, CV Tiara Wacana

- Benveniste, Guy, 1994, Birokrasi, Jakarta, PT rajaGrafindo Persada
- Blau, Peter, Meyer, Marshall, 2000, Birokrasi Dalam Masyarakat Modern, Jakarta, Penerbit Prestasi Pustakaraya
- Budi Setiono, 2005, Jaringan Birokrasi Tinjauan Dari Aspek Politik dan Administrasi”, Jakarta, Gugus Press
- Blau, Peter, Meyer, Marshall, 2000, Birokrasi Dalam Masyarakat Modern, Jakarta, Penerbit Prestasi Pustakaraya
- Budi Setiono, 2005, Jaringan Birokrasi Tinjauan Dari Aspek Politik dan Administrasi”, Jakarta, Gugus Press
- Osborne, David & Peter Plastrik, 2001, Memangkas Birokrasi, Jakarta, Penerbit PPM
- Said, Mas’ud, 2007, Birokrasi di Negara Birokratis, Malang, Penerbit UMM
- Akhmad Setiawan, 1998, Perilaku Birokrasi Dalam Pengaruh Paham kekuasaan Jawa, Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Budiono, Priyo, Santosa, 1993, Birokrasi Pemerintah Orde Baru Perspektif Kultural dan Struktural, PT Rajawali Press, Jakarta
- Budi Setiono, 2005, , Jaringan Birokrasi Tinjauan Dari Aspek Politik dan Administrasi”, Jakarta, Gugus Press
- David Osborne dan Ted Gaebler, 1993, Reinventing Government How The Entrepreneurial Spirit Is Transforming The Public Sector , England, A Plume Book
- Dwiyanto, Agus, 2006, Reformasi Birokrasi Publik Di Indonesia, Gajah Mada University Press, Jogja
- Karl D. Jackson, 1978, Political Power and Communication in Indonesia, Berkeley, University of California
- Akhmad Setiawan, 1998, Perilaku Birokrasi Dalam Pengaruh Paham kekuasaan Jawa, Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Budi Setiono, 2005, , Jaringan Birokrasi Tinjauan Dari Aspek Politik dan Administrasi”, Jakarta, Gugus Press
- Dwiyanto, Agus, 2006, Reformasi Birokrasi Publik Di Indonesia, Gajah Mada University Press, Jogja
- Karl D. Jackson, 1978, Political Power and Communication in Indonesia, Berkeley, University of California

- Michel Vatikotis, 1993, Indonesian Politics Under Soeharto Order, development, and Pressure For Change, London, Routledge
- Toha, Miftah, 2003, Birokrasi Dan Politik Di Indonesia, PT Grafindo Perkasa Press, Jakarta
- Akhmad Setiawan, 1998, Perilaku Birokrasi Dalam Pengaruh Paham kekuasaan Jawa, Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Budi Setiono, 2005, , Jaringan Birokrasi Tinjauan Dari Aspek Politik dan Administrasi”, Jakarta, Gugus Press
- Dwiyanto, Agus, 2006, Reformasi Birokrasi Publik Di Indonesia, Gajah Mada University Press, Jogja
- Toha, Miftah, 2003, Birokrasi Dan Politik Di Indonesia, PT Grafindo Perkasa Press, Jakarta
- Osborne, David dan Plastrik, Peter, 2001, Memangkas Birokrasi, Penerbit PPM, Jakarta
- Budi Setiono, 2005, , Jaringan Birokrasi Tinjauan Dari Aspek Politik dan Administrasi”, Jakarta, Gugus Press
- David Osborne dan Ted Gaebler, 1993, Reinventing Government How The Entrepreneurial Spirit Is Transforming The Public Sector , England, A Plume Book
- Dwiyanto, Agus, 2006, Reformasi Birokrasi Publik Di Indonesia, Gajah Mada University Press, Jogja
- Budi Setiono, 2005, Jaringan Birokrasi Tinjauan Dari Aspek Politik dan Administrasi”, Jakarta, Gugus Press
- David Osborne dan Ted Gaebler, 1993, Reinventing Government How The Entrepreneurial Spirit Is Transforming The Public Sector , England, A Plume Book
- Dwiyanto, Agus, 2006, Reformasi Birokrasi Publik Di Indonesia, Gajah Mada University Press, Jogja
- Indiahono, Dwiyanto, 2006, Reformasi “Birokrasi Amplop”, Mungkinkah ? Osborne, David dan Plastrik, Peter, 2001, Memangkas Birokrasi, Penerbit PPM, Jakarta
- Said, Mas’ud, M, 2007, Birokrasi di Negara Birokratis, UMM Press, Malang
- Budi Setiono, 2005, , Jaringan Birokrasi Tinjauan Dari Aspek Politik dan Administrasi”, Jakarta, Gugus Press

- Dwiyanto, Agus, 2006, Reformasi Birokrasi Publik Di Indonesia, Gajah Mada University Press, Jogja
- Toha, Miftah, 2003, Birokrasi Dan Politik Di Indonesia, PT Grafindo Perkasa Press, Jakarta
- Osborne, David dan Plastrik, Peter, 2001, Memangkas Birokrasi, Penerbit PPM, Jakarta
- Said, Mas'ud, M, 2007, Birokrasi di Negara Birokratis, UMM Press, Malang

PROFIL PENULIS



Suhardiman, S.Sos., M.Si memperoleh Sarjana Ilmu Administrasi Negara Universitas Muhammadiyah Makassar, Magister Ilmu Administrasi Negara Universitas Mulawarman Samarinda. Merupakan dosen Tetap Yayasan Pendidikan Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Telah mempublikasikan Artikel Ilmiah SCOPUS Google Scholar dan SINTA dengan fokus kajian Administrasi Publik. Dan sekarang sedang menempuh Program Doktor Administrasi Publik. Aktif dalam kegiatan

Workshop, Seminar Nasional, Bimbingan Teknik Application Approach (AA), Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) kerjasama dengan Universitas Gadjah Mada.



Dr. Marjoni Rachman, M.Si memperoleh Sarjana Ilmu Administrasi Negara Universitas Mulawarman, Magister Ilmu Administrasi Bisnis Universitas Brawijaya, dan Doktor Ilmu Administrasi Publik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Saat ini aktif sebagai Dosen Tetap pada Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, telah mempublikasikan Buku

dan 16 Artikel diantaranya terindeks SCOPUS, Google Scholar dan SINTA dengan fokus bidang Pelayanan Publik. Selain aktif mengajar sebagai dosen sering pula menjadi pembicara dalam berbagai pertemuan ilmiah, baik tingkat Regional, Nasional maupun Internasional. Selain itu aktif dalam organisasi maupun beberapa Asosiasi pada Provinsi dan skala Nasional, hingga saat ini masih aktif sebagai *Editor in Chief* pada jurnal internasional *Journal La Sociale*.



Jamiah, S.Sos.,M.Si memperoleh Sarjana Ilmu Administrasi Negara Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Magister Ilmu Administrasi Negara Universitas Mulawarman Samarinda, Merupakan dosen Tetap Yayasan Pendidikan 17 Agustus 1945 Samarinda. Telah mempublikasikan Artikel Ilmiah Google Scholar dan SINTA dengan fokus kajian Administrasi Publik, Aktif dalam kegiatan Workshop, Seminar skala regional dan Nasional, Bimbingan

Teknik Application Approad (AA).

Konsep Birokrasi sebagai suatu prosedur yang efektif dan efisien yang didasari oleh teori dan aturan yang berlaku serta memiliki spesialisasi menurut tujuan yang ditetapkan oleh organisasi serta ruang mesin negara yang didalamnya terdiri dari orang-orang (pejabat) yang igaji dan dipekerjakan oleh negara untuk memberikan nasehat dan melaksanakan kebijakan public. Sedangkan Konsep Governance Publik adalah cara dimana stakeholders saling berinteraksi dengan tujuan mempengaruhi hasil kebijakan public (Bovaird et al., 2003). Stakeholders tersebut antara lain adalah warga negara, organisasi masyarakat, media massa, Lembaga public, politisi, organisasi nirlaba dan sebagainya. Pokok pembahasan dalam buku ini mengkaji terminologi Birokrasi, aliran birokrasi, patologo Birokrasi, Reformasi Birokrasi, Peran Birokrasi dalam Negara, mewujudkan pelayanan Prima, serta Good Governance.



CV. Tahta Media Group
Surakarta, Jawa Tengah
Web : www.tahtamedia.com
Ig : tahtamedia group
Telp/WA : +62 813 5346 4169

ISBN 978-623-8192-00-7



9 786238 192007